

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

Daftar Isi

Kisah Tragis Anak Perempuan di Industri Seksual Komersial <i>The tragic story of Girls in Commercial Sexual Industry</i> Bagong Suyanto	163–173
Ketidakadilan Gender terhadap Perempuan Lokal dalam Upaya Penanggulangan HIV/AIDS <i>Gender Inequality Against Local Women in HIV/AIDS Prevention</i> Maimunah	174–183
Model Strategi Mitigasi Berbasis Kepentingan Perempuan pada Komunitas Survivor di Wilayah Rawan Banjir <i>Mitigation Strategic Model Based of Women Needs in Survivor Community at flood areas</i> Tri Joko Sri Haryono, Toetik Koesbardiati, Sri Endah Kinasih	184–194
Pembentukan Model Pemberdayaan Perempuan Nelayan di Daerah Tertinggal <i>The Establishment of Empowerment Model of Fish Monger Women in Underdeveloped Village</i> Waluyo Handoko, Sofa Marwah, Riris Ardhanariswari	195–201
Sistem Penguasaan Lahan dan Politik Pertanahan di Ekosistem Mangrove <i>The System of Land Tanure and Land Politics in Mangrove Ecosystem</i> Lukas Rumboko Wibowo dan C. Woro M. Runggadini	202–213
Urgensi Kepemimpinan, Modal Sosial dan Kerja Kolektif dalam Pemberdayaan Desa Mandiri Energi <i>Leadership Urgency, Social Capital and Collective Work of Empowerment of Independent Energy Village</i> Hartoyo, R Sigit Krisbintoro, Fauzan Mardapa, Dwi Haryono	214–222
Dinamika Etnisitas dan Konflik Politik pada Pemilukada <i>Dynamics of Ethnicity and Political Conflict in Pemilukada</i> M. Nawawi, Haslinda B. Anriani, dan Ilyas	223–232

Pembentukan Model Pemberdayaan Perempuan Nelayan di Daerah Tertinggal

The Establishment of Empowerment Model of Fish Monger Women in Underdeveloped Village

Waluyo Handoko¹, Sofa Marwah, Riris Ardhanariswari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

ABSTRACT

Women have a strategic role in the development and management of marine resources. In Kampung Laut, women had vital role in helping the family economy. The main subject of this research was the women in the fishing society. Informants were chosen using snowball sampling. Data were collected using interview, observation and documentation. Collected data were analyzed by collecting them systematically, taking notes, sorting, editing, classifying, reduction, presenting, and concluding them. The results of this study indicated a range of issues and problems of social, economic and cultural rights relating to compliance by the family economy and the constraints under which women's empowerment programs ever undertaken. It was important to anticipate the subsequent empowerment program In accordance to the theoretical stages of empowerment, a variety of information was important to be developed as models of women's empowerment in the Kampung Laut fishing village. The model was composed of participatory, cross-sector, and partnership-based; and it gradually led to the independence of those women.

Key words: women fishers, empowerment model, marine resource management, family economy

ABSTRAK

Wanita mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan dan pengurusan sumber laut. Di Kampung Laut, di tengah-tengah asas peralihan kehidupan yang disebabkan oleh pemendapan Segara Anakan mengubah struktur kehidupan, wanita berperan penting dalam membantu perekonomian keluarga. Subjek utama penelitian adalah perempuan nelayan dan melibatkan pula subjek terkait Penentuan informan dengan cara teknik *snowball*. Untuk pengumpulan data digunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Data yang sudah dikumpulkan, diolah dengan sistematis, dimulai dari menuliskan wawancara dan hasil observasi, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan data, hingga menyimpulkan data. Hasil penelitian ini mengindikasikan berbagai macam masalah sosial, ekonomi dan kebudayaan yang berkaitan dengan pemenuhan perekonomian keluarga. Berdasarkan program pemberdayaan perempuan didapatkan berbagai informasi penting guna membangun perkampungan nelayan. Model ini terdiri dari partisipasi, lintas sektor, berdasarkan hubungan pertemanan dan perlahan memberdayakan nelayan perempuan.

Kata kunci: nelayan perempuan, model pemberdayaan, manajemen sumber laut, ekonomi keluarga

Upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan di sektor kelautan dan perikanan tidak lepas dari kebutuhan untuk mengikutsertakan perempuan dalam kebijakan pembangunan di sektor tersebut, mulai dari perencanaan sampai implementasi. Pelibatan perempuan setara dengan laki-laki memiliki arti yang sangat penting bagi peningkatan perekonomian masyarakat pesisir. Hal ini tidak hanya

karena peran strategis perempuan dalam rumah tangga, tetapi juga karena perempuan berperan sebagai penyangga kebutuhan keluarga untuk menutup penghasilan melaut yang tidak pasti dan tidak mencukupi (Kusnadi 2006:2-3). Perempuan mengambil kedudukan yang penting dalam kegiatan ekonomi lokal dan pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi rumah tangganya. Sudah sepantasnya posisi

¹ Korespondensi: Waluyo Handoko. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman. Jalan Prof. Dr. HR. Boenyamin No. 107. Telepon: (0281) 635292 E-mail: ndoko_18@yahoo.com

perempuan nelayan diperhitungkan sebagai subjek pemberdayaan setara dengan laki-laki.

Salah satu kawasan pesisir adalah wilayah Kampung Laut Cilacap yang terletak di sepanjang laguna Segara Anakan. Tingkat kemiskinan daerah ini cukup tinggi, di mana 37,28 persen warganya masuk dalam kategori keluarga prasejahtera (Kampung Laut dalam Angka 2009). Selain itu, infrastruktur yang ada belum memadai, seperti sarana pendidikan, kesehatan, transportasi berupa perahu yang masih terbatas dan sederhana, serta tempat tinggal yang kurang layak bagi warga setempat. Sejauh ini berbagai program pengentasan kemiskinan yang sudah dilaksanakan, baik yang ditujukan untuk perempuan nelayan secara khusus ataupun warga secara umum, tidak dapat berkesinambungan dan kurang berhasil mengangkat perekonomian nelayan. Berkaitan dengan itu penting melakukan studi aksi yang bertujuan untuk menyusun model pemberdayaan perempuan nelayan secara partisipatif. Secara rinci penelitian ini dimaksudkan untuk: 1) mengidentifikasi isu permasalahan yang berkaitan dengan peran serta perempuan nelayan dalam membantu perekonomian keluarga; 2) mengidentifikasi dan menelaah berbagai kendala yang ada dalam upaya pemberdayaan perempuan nelayan; 3) membentuk model pemberdayaan yang diinginkan perempuan nelayan untuk penguatan ekonomi lokal dan menyusun rekomendasi model pemberdayaan kepada dinas atau instansi pemerintah terkait.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sebagai tahap awal dari rangkaian penelitian tindakan (*action research*) yang selaras dengan permasalahan dan tujuan penelitian (Irfan Islamy 2003). Subjek utama penelitian adalah perempuan nelayan yang dipilih sebagai informan dan melibatkan pula subjek terkait (Denzin & Lincoln 1994) seperti tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, tokoh organisasi), kepala desa dan perangkatnya, pejabat dinas atau kantor pemerintah daerah terkait. Penentuan informan dengan cara teknik *snowball* (Soetopo 2003). Untuk pengumpulan data digunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan ketika proses penelitian di lapangan sampai data dikumpulkan. Data yang sudah dikumpulkan, diolah dengan sistematis, dimulai dari menuliskan wawancara dan hasil observasi, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi,

menyajikan data, hingga menyimpulkan data (Miles & Huberman 1984).

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Geografis, Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kampung Laut

Secara geografis posisi Kampung Laut dan Segara Anakan berada di sepanjang batas sebelah barat pesisir selatan Pulau Jawa dan masuk dalam wilayah Kabupaten Cilacap. Segara Anakan merupakan laguna yang terhubung ke Samudera Hindia melalui dan dipisahkan oleh Pulau Nusakambangan. Di Segara Anakan, air laut Samudera Hindia bertemu dengan air tawar yang ditumpahkan oleh sungai yang mengalir dari daratan tinggi di sebelah utara, yaitu sungai Citandui, sungai Cibeureum, sungai Cikonde, sungai Cemeneng, dan lain-lain. Pertemuan arus laut dengan arus sungai ini menjadikan laguna mengalami pendangkalan akibat penumpukan lumpur yang dibawa oleh sungai. Secara bertahap beberapa dangkalan di Segara Anakan telah berubah menjadi daratan atau biasa disebut tanah timbul.

Wilayah Kampung Laut mencapai luas 14.221,80 ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 15.052 jiwa yang terdiri dari 7.142 perempuan dan 7.912 laki-laki. Wilayah ini terdiri dari empat desa, yaitu Desa Panikel, Klaces, Ujungalang dan Desa Ujunggagak. Penduduk yang mata pencahariannya paling banyak menjadi nelayan yaitu di Desa Ujungalang dan Ujunggagak. Sementara di dua desa lainnya, yaitu Desa Panikel dan Klaces, penduduk yang menjadi nelayan jumlahnya lebih sedikit dibanding penduduk yang menjadi petani. (Kecamatan Kampung Laut dalam Angka 2009). Kondisi fisik tempat tinggal penduduk setidaknya menunjukkan tingkat kesejahteraan mereka. Lebih dari sepertiga rumah penduduk Kampung Laut (37,48 persen), tempat tinggalnya tergolong belum layak dan tidak sehat karena hanya terbuat dari papan kayu dan bambu. Sementara yang cukup layak yaitu yang terbuat dari sebagian tembok dan sebagiannya kayu, jumlahnya mencapai 26,26 persen dan yang dapat dikatakan layak atau terbuat dari tembok seluruhnya hanya 36,25 persen saja. Tingkat pendidikan penduduk juga tergolong masih rendah. Hal itu tercermin dari 30,71 persen penduduknya hanya lulus SD dan 25,48 persen dari mereka tidak tamat atau belum sekolah. Sedangkan penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi jumlahnya kurang dari satu persen, begitu juga

yang lulus SLTA hanya 2,48 persen. (Kecamatan Kampung Laut dalam Angka 2009).

Identifikasi Isu dan Permasalahan Perempuan Nelayan dalam Pemenuhan Perekonomian Keluarga

Perubahan lingkungan kawasan laguna Segara Anakan yang diakibatkan proses sedimentasi, berdampak pada perubahan pola kehidupan sosial ekonomi yang berdampak pada perempuan maupun laki-laki. Dulu mereka adalah masyarakat yang hidup dari sumber daya perikanan laguna Segara Anakan yang melimpah. Mereka hanya mengandalkan jaring *apong* namun sudah mendapatkan hasil yang banyak dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sementara perempuan nelayan bertugas untuk mengelola pasca penangkapan ikan seperti memilah-milah ikan, mengolah ikan, ataupun menjualnya.

Ketika hasil penangkapan jaring *apong* tidak lagi menjanjikan, bukan persoalan yang mudah bagi mereka untuk mengembangkan alternatif usaha lain. Kenyataannya, upaya mengembangkan usaha tidak diikuti oleh kemampuan modal, ketrampilan, ataupun dukungan sarana maupun prasarana lain yang dibutuhkan. Kini kehidupan nelayan di pemukiman kawasan Segara Anakan tidak jauh dari gambaran kemiskinan nelayan di berbagai pesisir di belahan nusantara lain. Mereka adalah kelompok masyarakat nelayan yang mendiami perkampungan kumuh dan memiliki akses yang rendah terhadap pendidikan dan kesehatan.

Umumnya kaum perempuan mencoba untuk mengembangkan usaha dengan membuka toko atau warung makan karena keterbatasan kemampuan untuk mengembangkan jenis usaha lain. Namun usaha ini sering tidak berhasil karena banyak saingan, pengalaman yang kurang, serta keterbatasan modal untuk *kulakan* dari kota Cilacap. Sedikit dari mereka yang mencoba berwiraswasta seperti membuka rias pengantin atau menjahit. Keterbatasan dan tidak menentunya pendapatan mendorong sebagian dari mereka untuk meminjam kepada pada renteiner di desa. Bagi kaum perempuan, meminjam ke renteiner dirasakan lebih mudah karena tidak memerlukan persyaratan administratif sebagaimana kalau meminjam ke bank.

Secara umum, baik perempuan maupun laki-laki nelayan Kampung Laut dikenal memiliki watak yang keras. Hal ini sangat mungkin terkait dengan sejarah dari mana masyarakat tersebut berasal dan bagaimana mereka bertahan, tumbuh serta berkembang di

wilayah tersebut. Penduduk asli Kampung Laut adalah anak keturunan prajurit Mataram yang datang untuk mengamankan Segara Anakan dari gangguan bajak laut (orang Portugis), yang akhirnya menetap di situ.

Ketika Hindia Belanda berkuasa, mereka menyingkir dari Pulau Nusakambangan karena merasa terganggu oleh tahanan Belanda yang tidak terurus di pulau itu. Mereka membangun tempat tinggal di atas laguna Segara Anakan, yang berwujud rumah panggung dan akhirnya membentuk kampung yang dikenal dengan Kampung Laut. Hingga tahun 1970-an sampai awal tahun 1980-an, tempat tinggal di Kampung Laut masih berupa rumah panggung. Menjelang tahun 1980-an rumah-rumah panggung tersebut di atas mulai menghilang. Penyebabnya, selain makin sulit mendapatkan kayu untuk kerangka rumah, juga makin cepatnya laju pendangkalan laguna akibat sedimentasi. Mereka mulai mengganti tiang-tiang rumah dengan *urugan* tanah yang diambil dari Nusakambangan atau dari tanah timbul. Keberhasilan menguruk kolong-kolong rumah itu kemudian diikuti oleh seluruh warga kampung. Dewasa ini sudah sulit untuk mendapatkan rumah panggung yang berdiri di atas air laut, dan seluruh area tempat pemukiman pun kini sudah menjadi daratan.

Karakter mereka juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi sumber daya alam di sekitarnya. Dulu mereka adalah masyarakat nelayan yang tumbuh dan berkembang dalam wilayah dengan sumber daya alam melimpah. Kondisi lingkungan yang demikian secara pelan-pelan telah membentuk cara pandang yang berdampak pada kebiasaan yang selalu mengandalkan kondisi alam tanpa bersusah payah. Tidaklah mengherankan kalau kemudian ada anggapan mereka adalah nelayan yang malas dan mempunyai sikap mental yang kurang berani untuk berlayar ke samudra menjadi nelayan tangkap.

Selanjutnya jika menilik *basic culture* masyarakat, termasuk kaum perempuan, lebih menunjukkan pada kedekatan kultur nelayan dibandingkan kultur petani. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian SACDP-KPKSA (1994) yang lebih menempatkan mereka dengan *basic culture* petani yang ditunjukkan dengan adanya konflik perebutan tanah timbul. Alasan penelitian ini menempatkan mereka mempunyai *basic culture* nelayan dengan melihat sejarah asal dan perkembangan mereka bermukim di Kampung Laut, pengkaplingan laut sebagai hak milik, dan perebutan tanah timbul yang lebih menunjukkan pentingnya tanah bagi masyarakat Jawa, "*sak dumuk bathuk*

sak nyari bumi”. Itu berarti tidak melihat apakah itu nelayan atau petani, tetap membutuhkan tanah dalam hidupnya.

Selain itu sejak Segara Anakan masih memiliki sumber daya alam yang berlimpah, banyak dari masyarakat nelayan mempunyai kebiasaan judi untuk mengisi waktu luang menunggu penuhnya jaring *apong* oleh hasil laut. Kehidupan mereka yang dulunya relatif mapan telah mendorong masuknya orang-orang dari luar yang membawa kebiasaan judi. Berbagai jenis judi yang dilakukan, misalnya *patuhan*, *kartu ceki*, *balakan*, *kiu-kiu*, *adu jago* dan lain-lain. Kebiasaan ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi juga kaum perempuan bahkan sampai tingkat remaja. Alih-alih untuk mengisi waktu luang, judi sekarang justru dianggap sebagai alternatif untuk mendapatkan pemasukan di tengah minimalnya pendapatan mereka. Tokoh masyarakat dan pihak pemerintah telah mencoba berbagai cara untuk melakukan peringatan kepada mereka, namun kebiasaan judi masih tetap berlangsung sampai saat ini.

Dari berbagai kondisi di atas, muncul kecenderungan bahwa masyarakat Kampung Laut sangat membutuhkan kehadiran figur tokoh yang mampu menyatukan dan memimpin mereka demi mencapai kualitas kehidupan sosial ekonomi yang lebih memadai. Tokoh-tokoh yang dimaksudkan bukan hanya tokoh formal, tetapi juga figur-figur masyarakat yang mampu menjembatani apa yang dibutuhkan oleh mereka, baik kebutuhan perempuan maupun laki-laki. Keberadaan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta motivator di bidang kewirausahaan sangat penting artinya untuk secara terpadu bersama-sama menggerakkan masyarakat untuk mencapai perbaikan kualitas hidup.

Identifikasi Kendala dalam Pemberdayaan Perempuan Nelayan Kampung Laut

Kemiskinan masyarakat nelayan di Kampung Laut, sebenarnya tidak lepas dari perhatian Pemkab Cilacap untuk mengembangkan program pemberdayaan bagi masyarakat setempat. Pemkab Cilacap yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kantor Pengelola Kawasan Segara Anakan (KPKSA), bertugas menangani pembangunan kawasan tersebut dengan melakukan kegiatan konservasi dan mengenalkan alternatif usaha perikanan budi daya bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Program pengembangan yang telah dilakukan selain bersifat spesifik perempuan, juga ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat secara luas.

Selain itu terdapat upaya pengembangan dari dinas pemerintah lainnya atau organisasi masyarakat yang juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Beberapa program yang sudah dilaksanakan dapat dilihat dalam tabel 1.

Sejauh ini pelaksanaan berbagai program pemberdayaan di atas belum menunjukkan hasil dan tidak berkelanjutan. Demikian juga program pemberdayaan masyarakat dengan sasaran khusus perempuan nelayan juga mempunyai kondisi yang sama dengan program pemberdayaan yang sifatnya umum. Dari berbagai analisis informasi yang ada, ketidakberhasilan program disebabkan hal-hal sebagai berikut: 1) kegiatan pemberdayaan yang bersifat lintas sektoral atau organisasi masyarakat belum pernah dilaksanakan; 2) masyarakat penerima program pemberdayaan tidak terseleksi atau tidak menggunakan persyaratan khusus; 3) kegiatan yang bersifat pelatihan hanya berlangsung saat pelatihan saja, tidak diikuti dengan pembinaan atau evaluasi dan monitoring; 4) pemilihan jenis usaha yang diberikan dalam pelatihan, sering tidak melihat potensi dan tersedia atau tidaknya di wilayah tersebut; 5) untuk kegiatan yang sangat memerlukan dukungan pemasaran, kurang ada dukungan dari pihak pelaku program untuk melaksanakannya; dan 6) secara umum, program relatif bersifat ”proyek” yang selesai ketika kegiatan sudah dilaksanakan atau dana sudah habis.

Dari kajian terhadap kekurangberhasilan program-program di atas, didukung oleh observasi penelitian ini, dapat dijelaskan berbagai hal yang menjadi kendala dalam program pemberdayaan yang sudah pernah dilaksanakan dan harus diantisipasi dalam pembentukan model pemberdayaan perempuan nelayan yang akan dikembangkan. Berbagai kendala tersebut antara lain: 1) RPJMD Kabupaten Cilacap (2008–2013) DKP, Bapermades, Kecamatan Kampung Laut, dan Bagian Pemberdayaan Perempuan tidak memasukkan secara khusus program pemberdayaan perempuan nelayan; 2) tidak adanya mekanisme untuk mengoordinasikan program pemberdayaan perempuan nelayan secara khusus; 3) masyarakat kurang berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan; 4) masyarakat masih menunggu adanya program atau kegiatan pemberdayaan; 5) masyarakat masih tergantung pada tokoh figur panutan; 6) sulitnya kaderisasi dalam sebuah kelompok; 7) belum adanya rasa memiliki terhadap kelompok-kelompok yang sudah ada; 8) masyarakat masih mempunyai pemikiran bahwa program pemberdayaan adalah pemberian; 9) karakter masyarakat Kampung Laut mempunyai watak yang cenderung keras; 10) ketergantungan yang besar dari masyarakat terhadap sumber daya alam laut;

Tabel 1.
Program pemberdayaan perempuan yang pernah dilaksanakan di Kampung Laut

No.	Kegiatan Pemberdayaan	Pelaksana	Tahun
1.	Diseminasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan	Segara Anakan Conservation and Development Project (SACDP) Spesialis Pemberdayaan Perempuan KPKSA	2003
2.	Bantuan peralatan pembuatan tikar mendong dan sale pisang	Segara Anakan Conservation and Development Project (SACDP) Spesialis Pemberdayaan Perempuan KPKSA	2003
3.	Penyadaran perempuan dalam konservasi melalui kegiatan penyuluhan	Segara Anakan Conservation and Development Project (SACDP) Spesialis Pemberdayaan Perempuan KPKSA	2003–2004
4.	Penguatan kelembagaan	Segara Anakan Conservation and Development Project (SACDP) Spesialis Pemberdayaan Perempuan KPKSA	2003–2004
5.	Penyuluhan perlindungan mangrove untuk generasi penerus	Segara Anakan Conservation and Development Project (SACDP) Spesialis Pemberdayaan Perempuan KPKSA	2004
6.	Pelatihan berorganisasi bagi perempuan tani dan nelayan	Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jakarta	2007
7.	Pembentukan kelompok penghasil ebi dan terasi, pelatihan pembuatannya dan bantuan peralatan.	Pemerintah Kecamatan Kampung Laut	2007
8.	Pelatihan pembuatan bandeng presto, sriping pisang, ebi dan terasi.	PKK Desa	2007
9.	Koperasi simpan pinjam	PKK Desa	2007

Keterangan: dari berbagai sumber, diolah.

11) fasilitas infrastruktur yang tidak memadai juga berpengaruh terhadap perilaku masyarakat; dan 12) letak geografis Kampung Laut yang terpencil.

Pembentukan Model Pemberdayaan Perempuan Nelayan Kampung Laut

Langkah-langkah Pembentukan Model Pemberdayaan Perempuan Nelayan

Penelitian ini mengadopsi tahapan penyusunan model pemberdayaan dari *United Nations* yang dirincikan sebagai berikut; (a) *getting to know the local community*; (b) *gathering knowledge about the local community*; (c) *identifying the local leaders*; (d) *stimulating the community to realize that it has problems*; (e) *helping people to discuss their problem*; (f) *helping people to identify their most pressing problems*; (g) *fostering self-confidence*; (h) *deciding on a program action*; (i) *recognition of strengths and resources*; (j) *helping people to continue to work on solving their problems*; (k) *increasing people's ability for self-help*. (dalam Edi Suharto 2005:83-92).

Sesuai dengan hasil pengkajian di lapangan dan berkonsultasi dengan pakar pemberdayaan dan gender, maka tahapan tersebut diringkas menjadi enam tahapan pemberdayaan sebagai berikut: 1) memahami karakteristik lokal masyarakat Kampung Laut secara menyeluruh; 2) mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi tentang masyarakat secara detail; 3) memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang masalah yang dihadapi melalui pendekatan persuasif dan membangun rasa percaya diri mereka untuk menyelesaikan masalah

tersebut; 4) penetapan keputusan mengenai program kegiatan yang akan dilakukan dan dilanjutkan dengan implementasi program kegiatan; 5) pendampingan secara berkelanjutan untuk menyelesaikan permasalahan selama pelaksanaan program kegiatan; dan 6) pelaksanaan usaha kemitraan antara koperasi dan badan usaha.

Keseluruhan uraian sebelumnya yang menyangkut kondisi geografis, sosial dan ekonomi masyarakat Kampung Laut secara umum, identifikasi permasalahan perempuan nelayan dalam pemenuhan perekonomian keluarga, serta penelaahan terhadap kendala upaya pemberdayaan, merupakan pelaksanaan dari tahapan pemahaman karakteristik lokal dan mengumpulkan pengetahuan tentang masyarakat Kampung Laut yang menyangkut soal kependudukan, pekerjaan, pendidikan, status sosial ekonomi, nilai dan sikap, faktor kepemimpinan dan lain sebagainya. Selain itu, informasi penting yang dibutuhkan juga menyangkut tentang potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk upaya pemberdayaan perempuan nelayan. Beberapa potensi ekonomi yang ada meliputi: 1) perikanan terpadu yang perlu dikembangkan secara intensif, baik dalam pengelolaan maupun pemasaran; 2) pengembangan perikanan sungai dan genangan air secara lebih intensif; 3) pemanfaatan tumbuhan mangrove, terutama jenis *jrujon* untuk pembuatan teh dan krupuk yang sudah mulai dirintis, yang perlu dikembangkan dalam hal pengelolaan dan pemasaran; dan 4) pemanfaatan tanah timbul sebagai tambak (dalam jangka pendek) dan untuk lahan pertanian (dalam jangka panjang).

Sesuai dengan pentahapan penyusunan model di atas, maka penelitian ini melanjutkannya dengan melakukan pendekatan langsung ke lapangan secara persuasif untuk mendorong kesadaran bagi warga, khususnya perempuan nelayan, mengenai berbagai persoalan yang dihadapi di tengah himpitan ekonomi. Proses ini selain ditujukan untuk perempuan nelayan, juga melibatkan tokoh masyarakat, laki-laki nelayan, dan perangkat desa. Termasuk juga dalam hal ini membantu mereka membangun kepercayaan diri untuk menyelesaikannya demi mencapai perekonomian yang lebih baik. Beberapa penekanan yang berkaitan dengan proses kesadaran tersebut meliputi: 1) kebutuhan untuk mengembangkan alternatif usaha tidak cukup mengandalkan modal dana tetapi juga ketrampilan, pengetahuan, dan kemauan keras; 2) pentingnya partisipasi aktif perempuan nelayan setara dengan laki-laki, dalam kegiatan program pengembangan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan; 3) pemahaman bahwa program pengembangan yang ada bukan bersifat bantuan, tetapi bersifat memancing bertindak mandiri dan mampu mengembangkan; 4) kemauan untuk bekerja sama dengan tokoh-tokoh terkait, baik formal maupun informal, untuk bersama-sama keluar dari permasalahan; 5) pentingnya pemahaman bagi tokoh-tokoh terkait, bahwa warga perempuan maupun laki-laki nelayan membutuhkan keberadaan mereka melalui cara yang persuasif; 6) pentingnya sikap bekerja sama dengan pihak luar dengan itikad baik untuk bersama-sama membantu warga untuk meningkatkan kehidupan perekonomian; 7) kebutuhan untuk membangun kerja sama dan rasa memiliki dalam kelompok, baik perempuan maupun laki-laki untuk menyelesaikan persoalan bersama-sama; 8) keharusan untuk mengalihkan kebiasaan warga, kaum perempuan dan remaja, dari kebiasaan judi menjadi kegiatan yang lebih bermanfaat, secara bertahap; 9) keharusan untuk menjaga kelestarian lingkungan di kawasan Segara Anakan secara berkelanjutan; dan 10) pentingnya kehati-hatian perempuan untuk melakukan peminjaman uang kepada rentenier, yang selama ini dianggap lebih mudah syaratnya.

Kegiatan untuk menyusun model pemberdayaan dilanjutkan dengan mendapatkan masukan dan pertimbangan dari instansi pemerintah terkait, yang terdiri dari KPKSA, DKP, Bagian Pemberdayaan Perempuan, Bapermades, dan Pemerintah Kec. Kampung Laut. Beberapa masukan dan pertimbangan dalam menyusun program pemberdayaan perempuan nelayan antara lain sebagai berikut: 1) program bersifat partisipatif yaitu sesuai dengan keinginan dan melibatkan perempuan nelayan dan masyarakat luas

secara menyeluruh; 2) melibatkan tokoh masyarakat yang potensial, aparat pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, motivator kewirausahaan dalam model pemberdayaan lintas sektoral; 3) memperhatikan kondisi geografis Kampung Laut dan tidak merusak lingkungan setempat; 4) memaksimalkan potensi ekonomi yang ada di wilayah tersebut; 5) program bersifat praktis dengan dukungan peralatan teknologi yang tepat guna dan relatif sederhana, khususnya untuk kelompok perempuan; dan 6) pembentukan kelompok secara variatif dengan bantuan mulai dari pelatihan, bahan dasar, maupun peralatan harus didukung dengan pendampingan sampai pemasaran.

Model Pemberdayaan Perempuan Nelayan

Pemerintah menerapkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan melalui Inpres No. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional (PUG). PUG mencakup perencanaan program maupun pelaksanaannya. Program yang dimaksudkan merujuk pada RPJMN/RPJMD, RKP/RKPD, dan RAPBN/RAPBD (Anonim 2001). Di sektor perikanan dan kelautan misalnya, kebijakan pengentasan kemiskinan perlu melibatkan perempuan nelayan melalui integrasi kebijakan pembangunan dari kebijakan, dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Di tingkat Pemkab Cilacap, pemberdayaan perempuan nelayan Kampung Laut seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten sejalan dengan RPJMN. RPJMD SKPD Kab Cilacap yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan nelayan Kampung Laut antara lain Bagian Pemberdayaan Perempuan, Bapermades, DKP dan Kec. Kampung Laut. Kenyataannya, RPJMD SKPD Bagian Pemberdayaan Perempuan tahun 2008–2013 belum ada program pemberdayaan perempuan nelayan. Sedangkan RPJMD SKPD Bapermades tahun 2008–2013, walaupun sudah mencakup program pemberdayaan masyarakat berperspektif gender (P2MBG) tetapi kegiatannya masih bersifat fisik. RPJMD SKPD DKP tahun 2008–2013 juga tidak ada yang secara khusus menyentuh pemberdayaan perempuan nelayan. Bahkan untuk hierarki pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Kampung Laut, RPJMD SKPD Kec. Kampung Laut tahun 2008–2013 juga tidak mencakup program pemberdayaan perempuan nelayan Kampung Laut (RPJMD Pemkab Cilacap tahun 2008–2013). Namun demikian Bagian Pemberdayaan Perempuan, Bapermades, DKP, Kec. Kampung Laut maupun KPKSA mempunyai komitmen untuk

mendukung bagi upaya pengembangan perempuan nelayan Kampung Laut. Berbagai pertimbangan dan masukan dari SKPD-SKPD tersebut menjadi bagian penting untuk menyusun model pemberdayaan perempuan nelayan.

Tahapan pemberdayaan berikutnya yaitu penetapan program kegiatan yang akan dilakukan. Program kegiatan dirangkum dalam sebuah model pemberdayaan perempuan nelayan Kampung Laut yang mencakup mulai dari tujuan/manfaat/bentuk program, pelaku serta peran dan fungsi pelaku program, target program, tahapan, dan keterkaitan masing-masing dalam sebuah model pemberdayaan. Berikut ini dijabarkan dalam gambar dan uraian:

Tahapan penetapan keputusan kegiatan di atas dilanjutkan dengan implementasi program kegiatan yang membutuhkan dukungan regulasi dari pemerintah daerah untuk memberikan kepastian hukum. Sesuai dengan tahapan model pemberdayaan, langkah berikutnya yaitu pendampingan berkelanjutan selama pelaksanaan program yang dilakukan oleh Pemkab dan didukung oleh konsultan secara *sustainable* serta kerjasama kemitraan antara koperasi yang sudah dibentuk dan BUMD.

Simpulan

Simpulan penelitian ini yang juga terkait dengan tahapan penyusunan model pemberdayaan perempuan nelayan. Isu dan permasalahan perempuan nelayan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga: 1) pendapatan keluarga yang tidak menentu, akibat semakin sedikitnya hasil *apong*; 2) sulitnya mengembangkan alternatif usaha seperti toko atau warung makan untuk menambah pendapatan keluarga; 3) sulitnya akses terhadap modal usaha (kredit perbankan) dan ketergantungan pada rentenier; 4) perempuan nelayan merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai watak karakter keras dan dimanjakan oleh sumber daya alam; 5) perempuan nelayan bagian dari masyarakat yang mempunyai basis kultur nelayan; 6) kebiasaan melakukan perjudian menjadi sulit diatasi; 7) baik perempuan dan laki-laki sangat membutuhkan kehadiran figur pemimpin yang mampu dijadikan panutan.

Kendala dalam upaya pemberdayaan terhadap perempuan nelayan Kampung Laut: 1) belum masuknya program pemberdayaan perempuan nelayan dalam RPJMD Kab.Cilacap; 2) tidak adanya koordinasi antar dinas/lembaga terkait; 3) kurang adanya partisipasi masyarakat; 4) masyarakat masih bersikap menunggu program; 5) masyarakat

masih tergantung pada figur panutan; 6) proses kaderisasi yang sulit; 7) belum adanya rasa memiliki terhadap kelompok-kelompok yang sudah ada; 8) masyarakat mempunyai pemikiran bahwa program-program tersebut adalah pemberian saja; 9) karakter masyarakat Kampung Laut yang mempunyai watak keras; 10) ketergantungan yang besar terhadap sumber daya alam laut; 11) fasilitas infrastruktur tidak memadai; 12) akses geografis yang sulit.

Model pemberdayaan perempuan nelayan Kampung Laut yang sudah disusun merupakan gabungan dari kajian empirik dan aspek teoretis pemberdayaan, konsultasi dengan instansi-instansi pemerintah, telaah literatur terkait, sekaligus masukan dari pakar pemberdayaan dan gender. Realisasi dari pelaksanaan model pemberdayaan tersebut bersifat partisipatif, terkoordinasi lintas sektoral (Pemkab, BUMD, koperasi, konsultan dan target program) dengan menekankan pola kemitraan, yang menuju proses pemberdayaan perempuan nelayan Kampung Laut yang secara bertahap mampu untuk mandiri. Model pemberdayaan yang sudah tersusun akan direkomendasikan pada dinas atau instansi pemerintah terkait.

Daftar Pustaka

- Anonim (2001) Panduan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, CIDA- Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI- WSP II. Jakarta.
- Draft Sejarah Kampung Laut (2008) Pemerintah Kecamatan Kampung Laut. Unpublished.
- Denzin N & Lincoln Y (1994) Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks London: Sage Publications.
- Edi S (2005) Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Islamy I (2003) Rancangan Penelitian Tindakan. Dalam: Bakri M (ed). Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoretis dan Praksis. Malang: Lemlit Unisma dan Visipress.
- Kecamatan Kampung Laut dalam Angka (2009) Bagian Tata Pemerintahan Kecamatan Kampung Laut.
- Kusnadi (2006) Perempuan Pesisir. Yogyakarta: LkiS.
- Miles MB & Huberman AM (1984) Qualitative Data Analysis. California: Sage Publications.
- Soetopo (2003) Pengumpulan dan Pengolahan Data dalam Penelitian Kualitatif. Dalam: Basri M (ed). Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoretis dan Praksis. Malang: Lemlit Unisma dan Visipress.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Cilacap tahun 2008-2013.